



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

HASIL PEMANTAUAN TREN VONIS TIPIKOR TAHUN 2022

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW

12 Juli 2023

www.antikorupsi.org



Pendahuluan

- Kepatuhan dan ketertiban institusi pengadilan dalam mengunggah putusan ke laman [Direktori Mahkamah Agung](#) menjadi faktor penentu dari pengumpulan dan pengolahan data dalam Tren Vonis 2022.
- Rentang waktu pemantauan Tren Vonis 2022 adalah 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022, dengan periode pengumpulan data mulai 9 Februari 2023 hingga 6 April 2023.
- Pada rentang waktu tersebut, ICW berhasil menghimpun sekitar 2.056 putusan dengan 2.249 terdakwa.

Temuan Umum

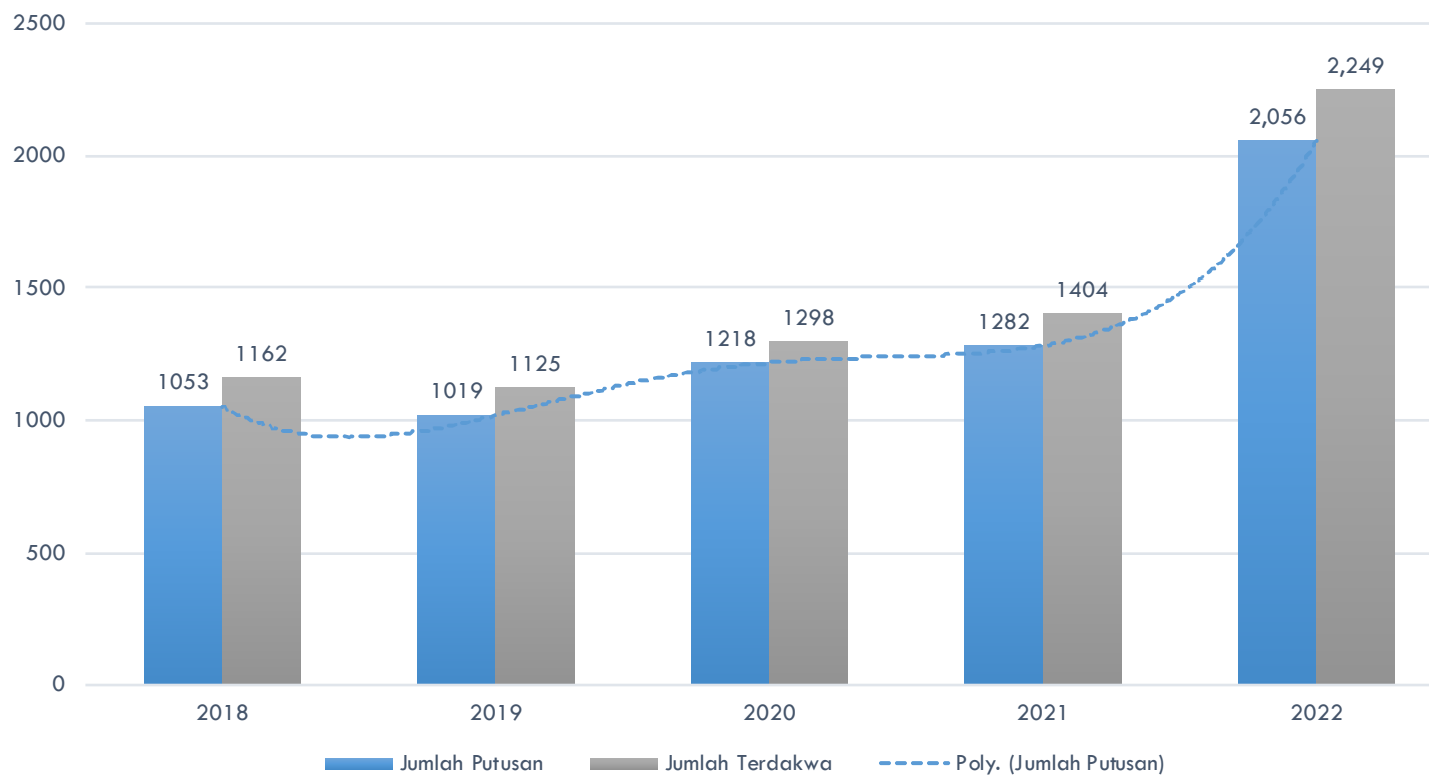
- Rata-rata pidana penjara di seluruh tingkat pengadilan untuk terdakwa kasus korupsi di tahun 2022 adalah selama, 40 bulan atau **3 tahun 4 bulan**

Tingkat pengadilan	Jumlah Putusan	Jumlah Terdakwa	Rata-rata pidana (bulan)	Rata-rata pidana (tahun)
Pengadilan Tipikor pada PN	1.160	1.271	37 bulan	3 tahun 1 bulan
PT	598	648	46 bulan	3 tahun 10 bulan
MA	298	330	43 bulan	3 tahun 7 bulan

Temuan Umum (1)

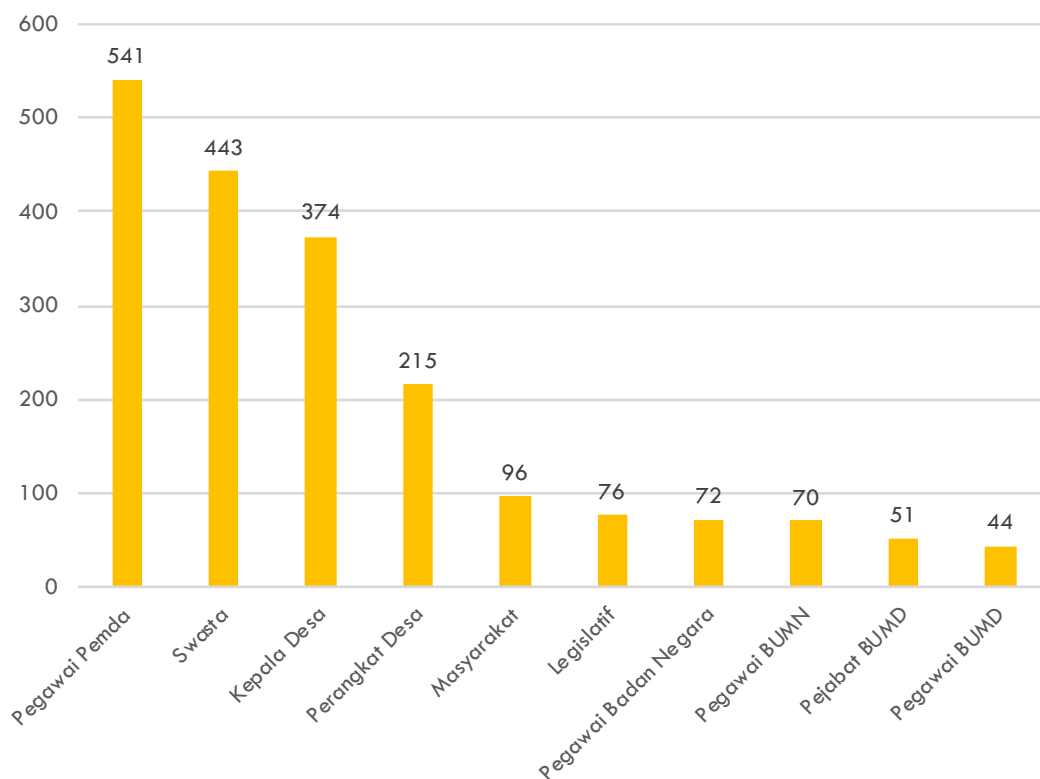
- Adapun jumlah kerugian negara 2022 adalah sebesar, Rp48.786 triliun dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar Rp376.710 miliar, dan jumlah pencucian uang sebesar, Rp244.728 miliar.
- 22 terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, 1 (satu) korporasi yang menjadi terdakwa korupsi yaitu, PT. Adonara Propertindo, dan hanya 28 terdakwa yang didakwa, dituntut, dan diputus dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tren Jumlah Putusan dan Terdakwa Tipikor 2018-2022



Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi

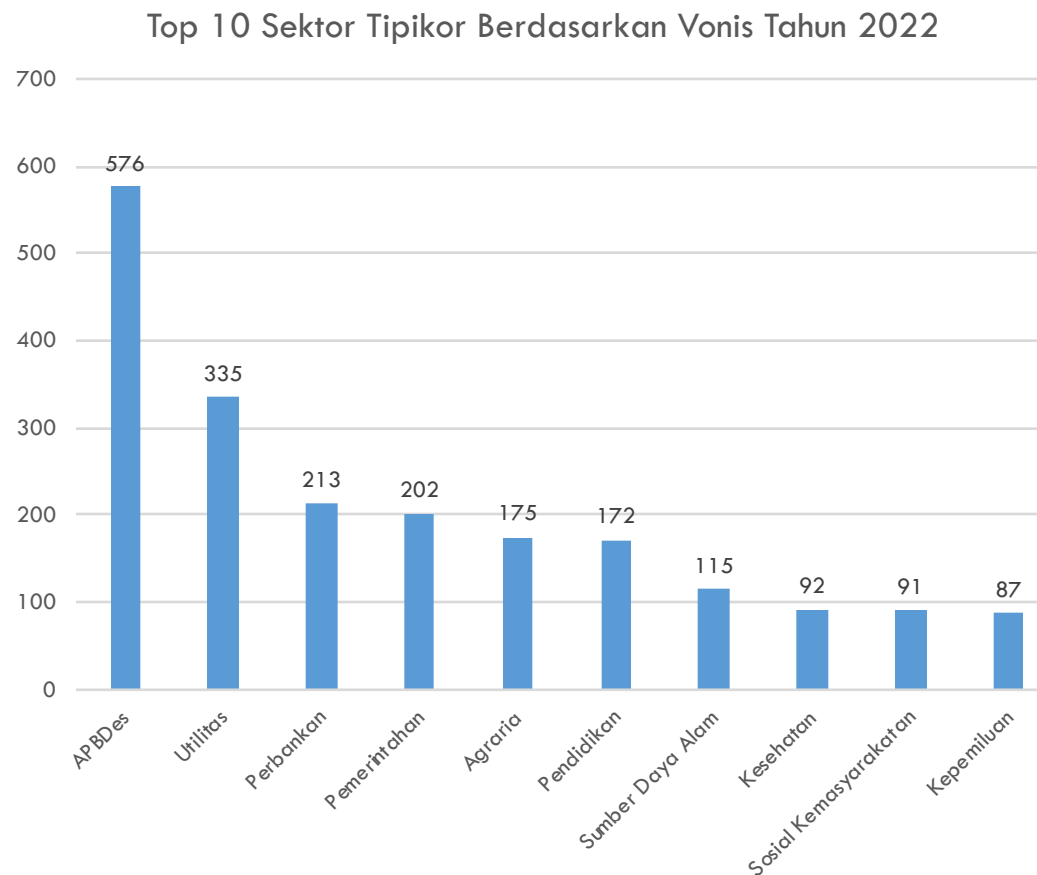
Top 10 Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa Korupsi
2022



- Pegawai pemda, swasta, dan kepala desa, merupakan pekerjaan yang paling banyak terjerat kasus korupsi.
- Aparat penegak hukum belum berupaya lebih keras untuk menjerat aktor dengan latar belakang pekerjaan yang lebih strategis seperti pejabat negara, pejabat tinggi negara, aparat penegak hukum, maupun korporasi.

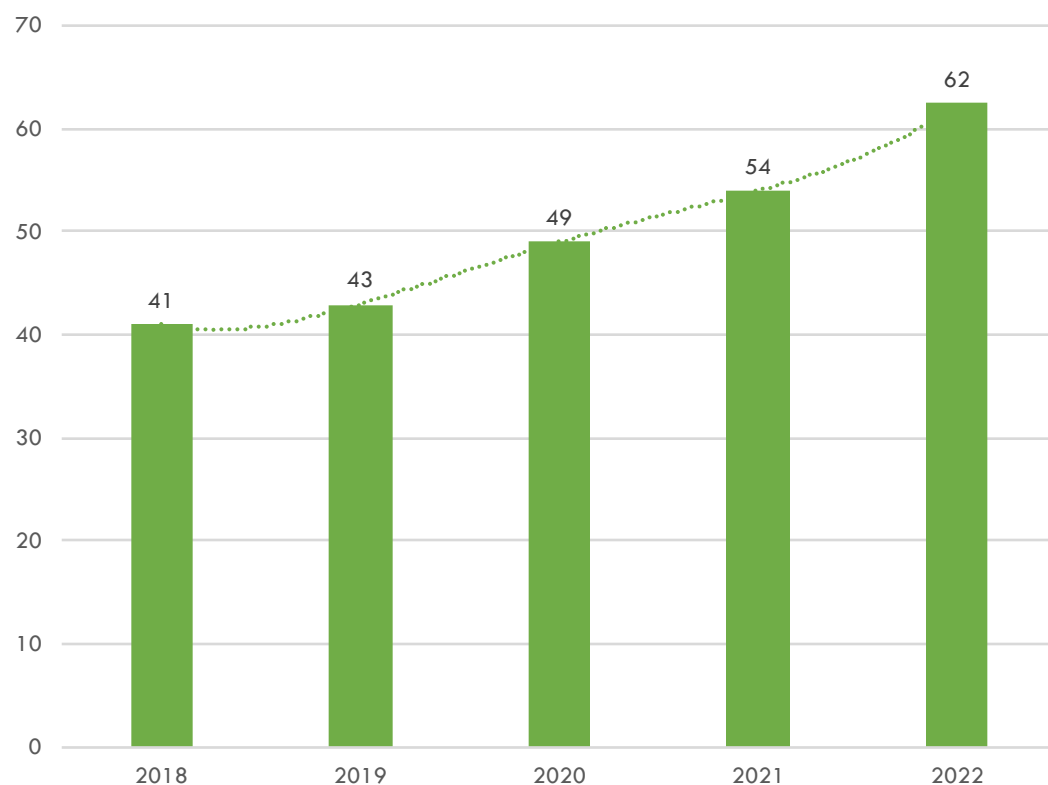
Sektor Terjadinya Korupsi

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes masih menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi pada tahun 2022.
- Temuan ini tentu menarik untuk didalami, karena APBDes, kepala, serta perangkat desa, konsisten menempati "peringkat" tiga teratas dalam perkara korupsi setiap tahunnya.
- Sektor lainnya yang menarik untuk dicermati dan dipantau perkembangan polanya adalah, korupsi di sektor perbankan dan kepemiluan.



Tren Penuntutan

Tren Penuntutan Tipikor (bulan)
2018-2022

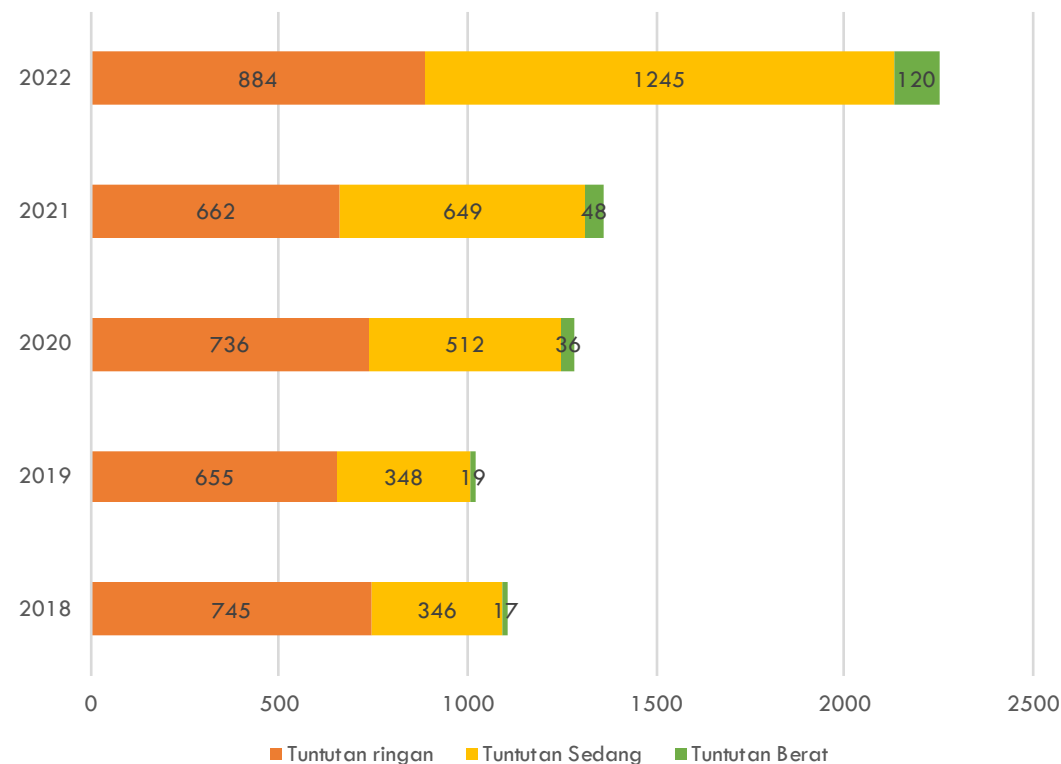


- Rata-rata tuntutan terdakwa korupsi tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan, meningkat dari tahun 2021, yang rata-ratanya adalah 54 bulan atau 4 tahun 6 bulan.
- 884 terdakwa (39,31%) dituntut dengan kategori ringan (1-4 thn), 1.245 terdakwa (55,36%) dituntut dengan kategori sedang (>4-10 tahun), dan 120 terdakwa (5,34%) dituntut dengan kategori berat (>10 tahun).

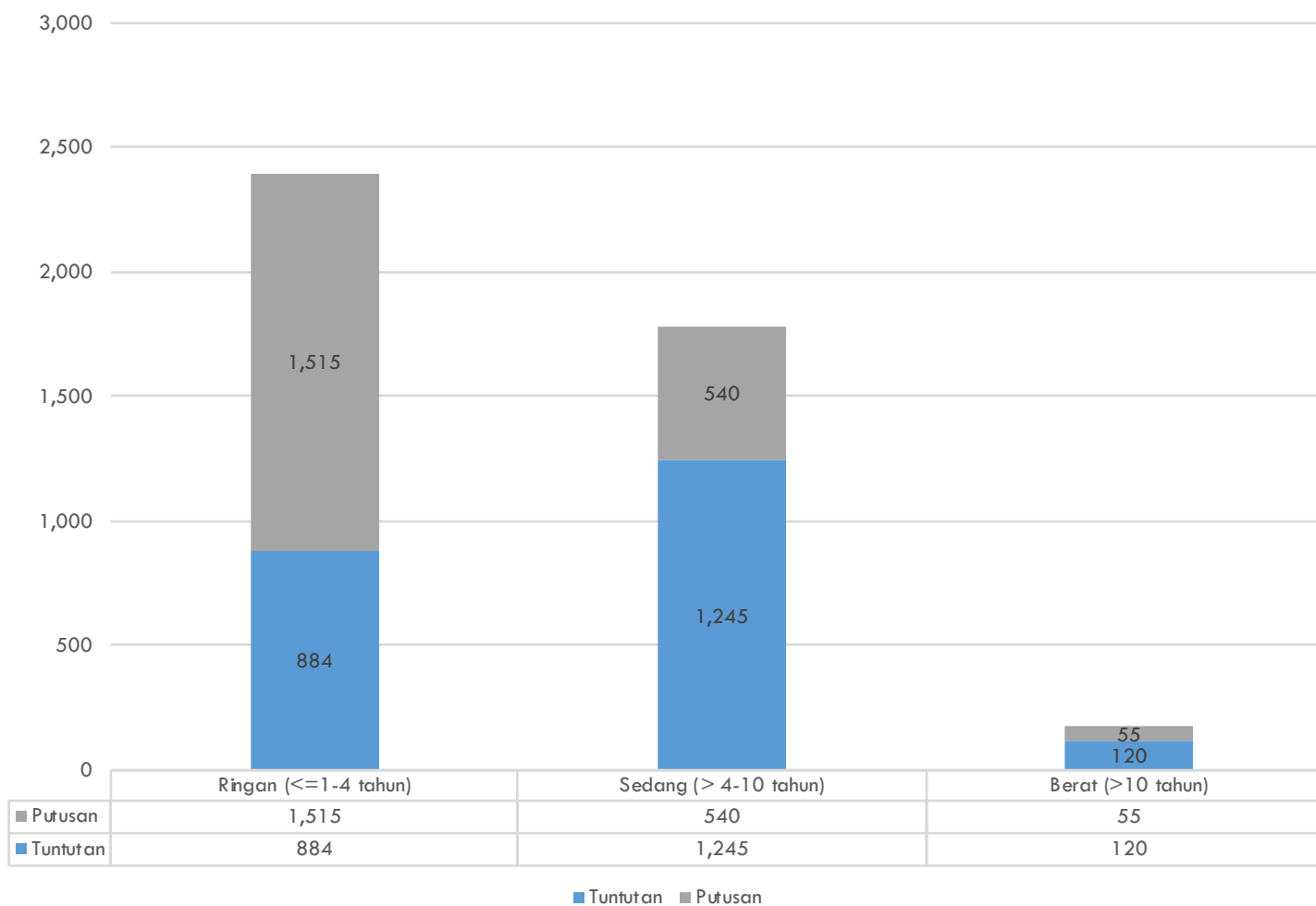
Tren Berat-Ringan Tuntutan Tipikor

- Selama setidaknya 4 (empat) tahun ke belakang, kategori penuntutan tindak pidana korupsi masih didominasi dengan kategori ringan (1-4 tahun). Kecenderungan tersebut berubah di tahun 2022, di mana kategori penuntutan di tahun 2022 didominasi oleh tuntutan dengan kategori sedang.
- Kecenderungan peningkatan jumlah kategori penuntutan dari kategori ringan menjadi sedang ini, perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depannya, terutama untuk para terdakwa yang didakwa dengan dakwaan kombinasi maupun kumulatif, residivis, maupun terdakwa yang diduga kuat terlibat dalam lebih dari 1 (satu) tindak pidana korupsi di waktu berdekatan.
- Namun, perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas dakwaan itu sendiri, mengingat perubahan tren kategori penuntutan ini, tidak dibarengi dengan perubahan tren kategori putusan.

Tren Berat Ringan Tuntutan
2018-2022

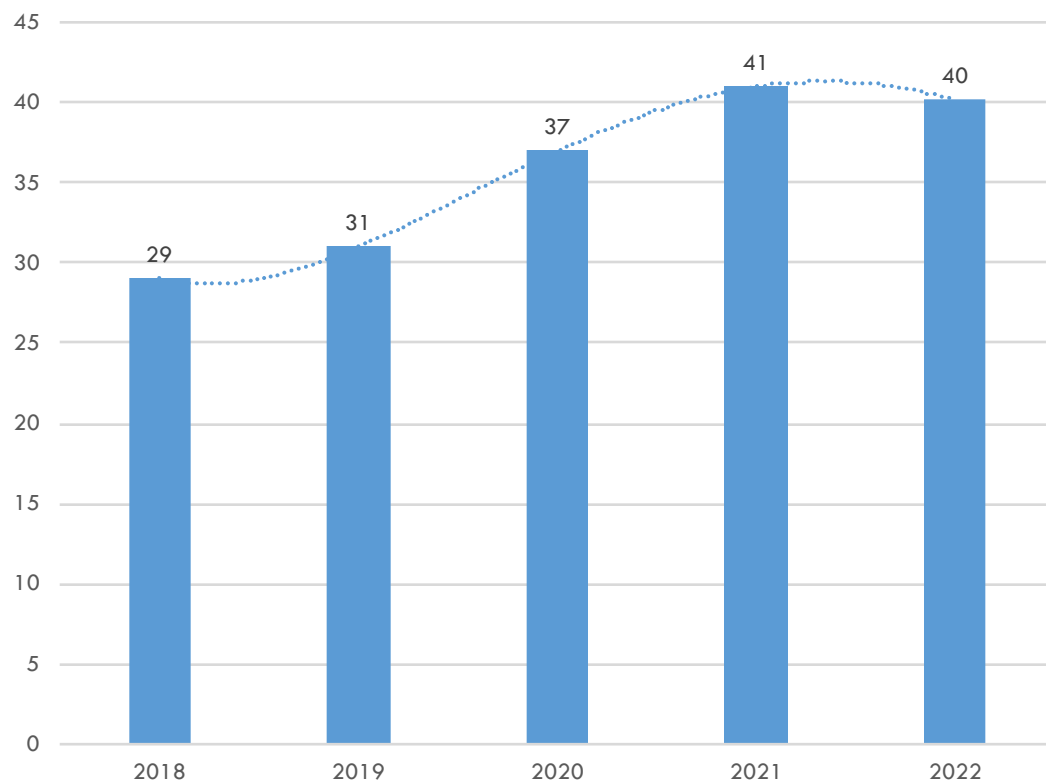


Perbandingan Kategori Tuntutan vs Putusan Tipikor 2022



Tren Vonis Tipikor

Tren Vonis Tipikor (bulan)
2018-2022

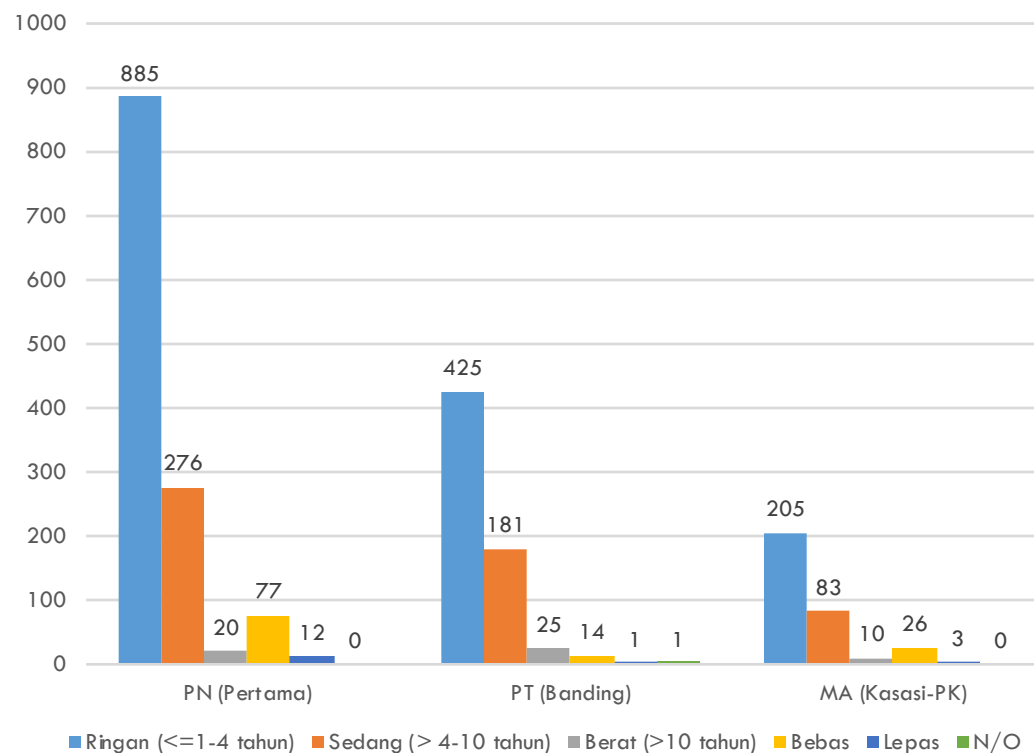


- 1.515 terdakwa divonis pidana penjara kategori ringan (1 tahun-4 tahun), 540 terdakwa divonis dengan kategori sedang (>4 tahun-10 tahun), dan 55 terdakwa divonis dengan pidana penjara kategori berat (>10 tahun). Sedangkan, ada 134 terdakwa yang divonis bebas, lepas, atau N/O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- Secara umum, meskipun tidak terlalu signifikan, terjadi penurunan rata-rata vonis di tahun 2022, dari 41 bulan atau 3 tahun 5 bulan di tahun 2021, menjadi 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan pada 2022.

Sebaran Kategori Putusan Tipikor Tahun 2022

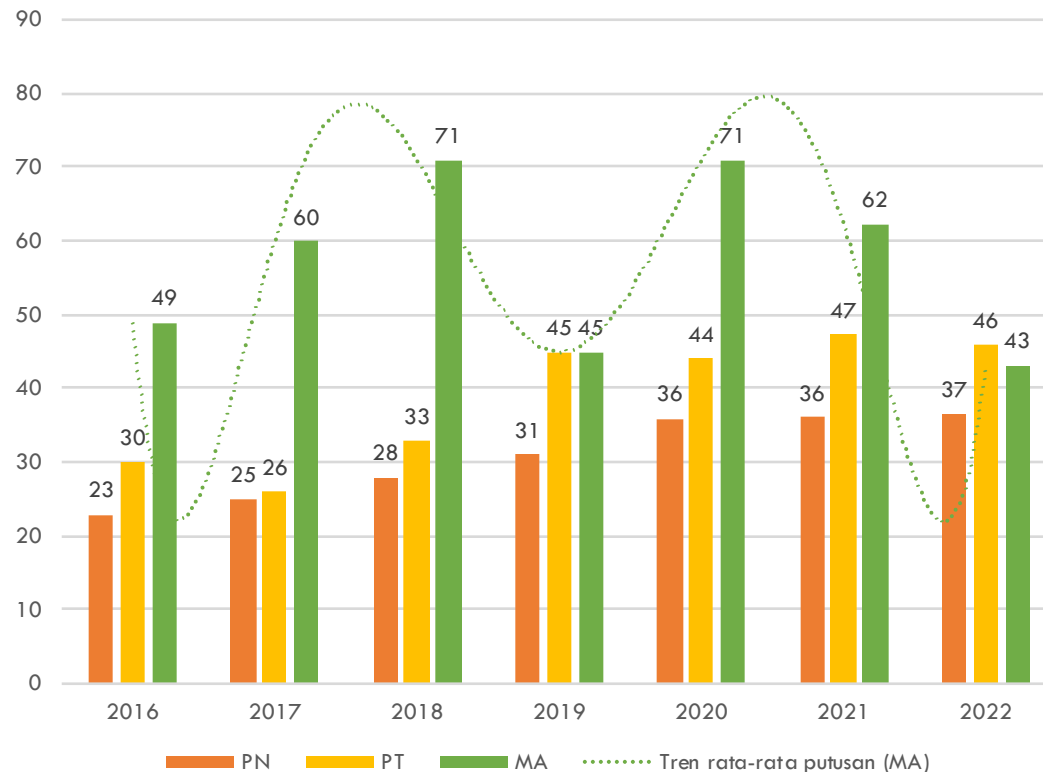
- Pada tingkat pengadilan tipikor pada pengadilan negeri sebanyak 885 terdakwa (69.55%) divonis dengan pidana penjara kategori ringan, 276 terdakwa (21.72%) divonis dengan pidana penjara sedang, 20 terdakwa (1.57%) divonis dengan kategori berat, 77 terdakwa (6.06%) divonis bebas, 12 terdakwa (0.94%) divonis lepas.
- Pada tingkat pengadilan tinggi, 425 terdakwa divonis ringan, 181 divonis sedang, 25 terdakwa divonis berat, 14 terdakwa divonis bebas, 1 (satu) orang terdakwa divonis lepas, dan 1 (satu) orang terdakwa divonis N.O
- Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung, 62.12% terdakwa atau sebanyak 205 terdakwa divonis ringan, 25.15% atau sebanyak 83 terdakwa divonis sedang, 2.74%, 10 terdakwa divonis berat, 26 terdakwa atau sebanyak 7.88% divonis bebas, dan 3 (tiga) terdakwa atau 0.91 % divonis lepas.

Kategori Putusan Tipikor Berdasarkan Tingkat Pengadilan 2022



Pergeseran Tren Rata-rata Putusan MA

Tren rata-rata putusan berdasarkan tingkatan pengadilan (bulan) 2016-2022

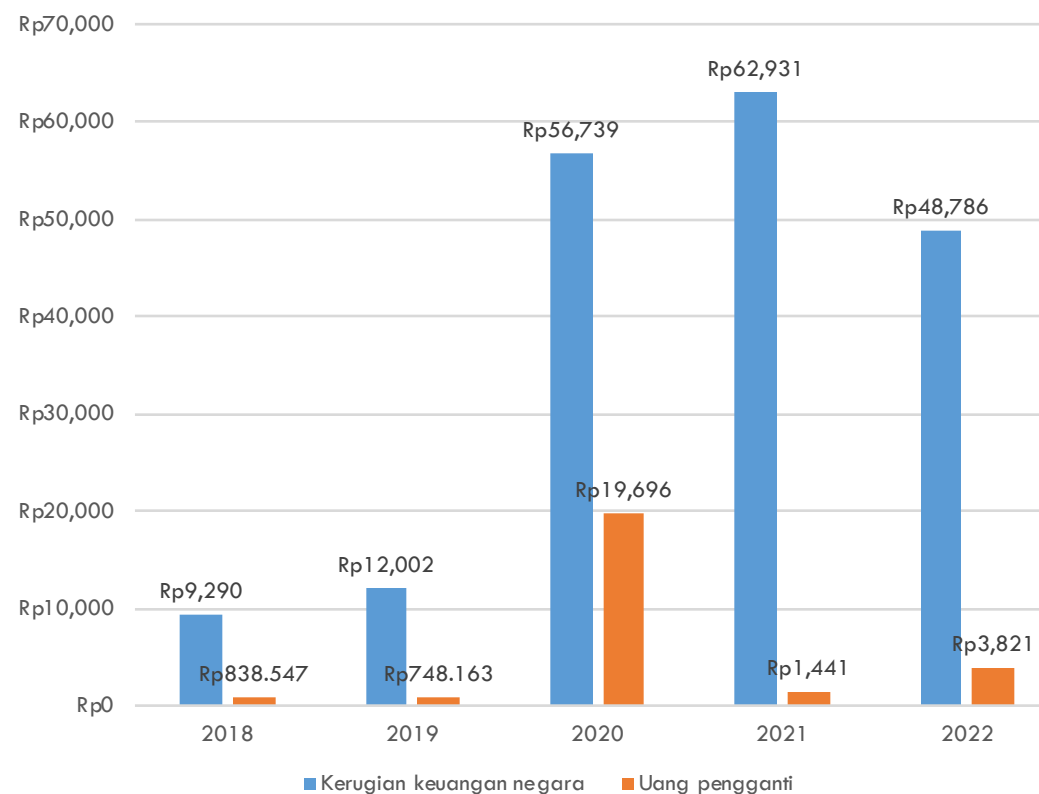


- Mahkamah Agung mencatat lebih banyak putusan bebas (26 terdakwa) dibandingkan berat (10 terdakwa) di tahun 2022.
- Dari 26 terdakwa yang diputus bebas, 5 (lima) terdakwa diputus oleh majelis hakim yang beranggotakan Gazalba Saleh.
- Rata-rata putusan untuk tingkat MA juga mengalami penurunan drastis, dari rata-rata 5 tahun 2 bulan, menjadi rata-rata 3 tahun 7 bulan.

Kerugian Negara vs Uang Pengganti

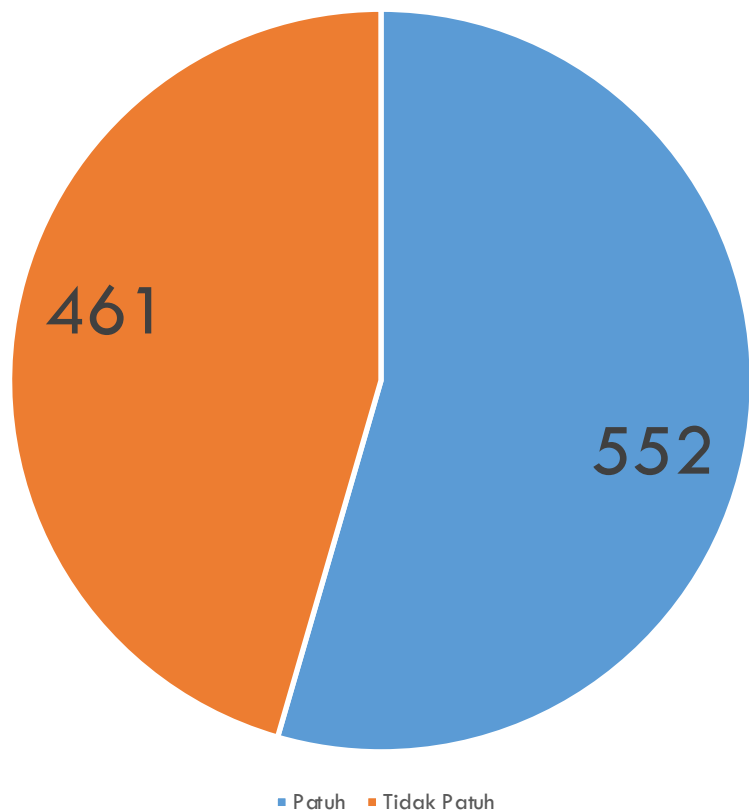
- Jumlah pidana tambahan uang pengganti di tahun 2022 hanya sebesar, Rp3.821 triliun, padahal jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai, Rp48.786 triliun.
- Dengan kata lain, pemulihan kerugian negara yang diperoleh dari uang pengganti hanya sebesar 7,83% dari kerugian yang ditimbulkan akibat tipikor.

TREN KERUGIAN NEGARA VS UANG PENGGANTI
2018-2022 (DALAM MILIAR RUPIAH)



Penerapan SEMA 3/2018 (Sampling putusan PN 2022)

Kepatuhan Penerapan SEMA 3/ 2018 (Sampling PN) 2022



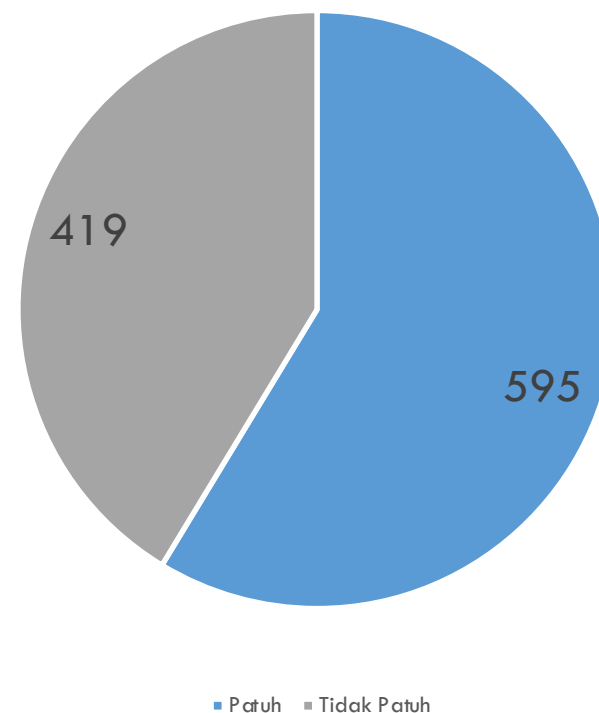
- Meskipun penerapannya masih kerap menimbulkan polemik, tetapi penggunaan pasal terkait korupsi kerugian keuangan negara, masih mendominasi dakwaan dan putusan pengadilan.
- Di tingkat PN ada setidaknya 1.271 terdakwa, atau sekitar 56,51% dari total terdakwa, dan ada 1.007 terdakwa (79,23%) yang diputus menggunakan pasal terkait kerugian negara.
- Merespon hal tersebut, pada 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 3/2018).
- Perbedaan kedua unsur tersebut terletak pada besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi terdakwa. Terdakwa yang mengakibatkan kerugian negara Rp200.000.000 ke atas dikenakan pasal 2 ayat (1), sedangkan yang mengakibatkan kerugian negara di bawah Rp200.000.000 dikenakan pasal 3 UU Tipikor.



Penerapan PERMA 1/2020 (Sampling putusan PN 2022)

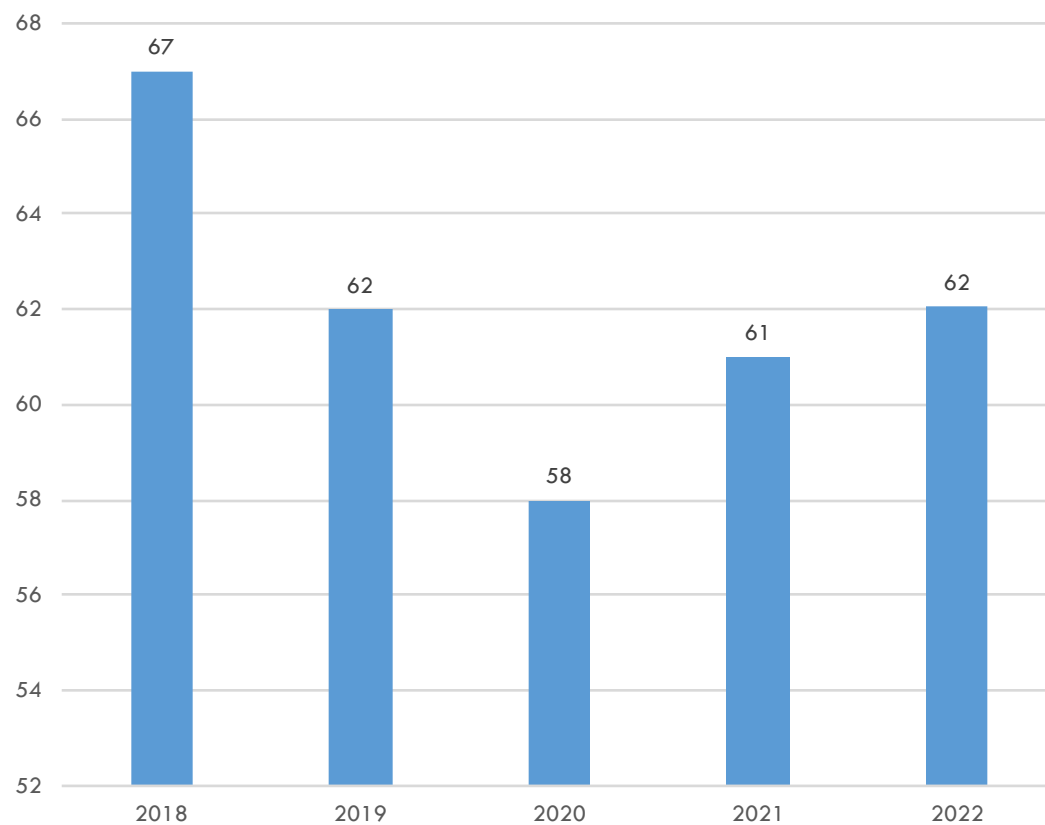
- Serupa dengan kepatuhan terhadap SEMA 3/2018, di tahun 2022 mayoritas majelis hakim yang memutus terdakwa dengan pasal terkait kerugian negara, telah menerapkan PERMA 1/2020. Sebanyak 595 terdakwa (46,81%) diputus sesuai dengan panduan pemidanaan pada PERMA 1/2020, setidaknya untuk komponen kerugian negara
- Kepatuhan tersebut perlu ditingkatkan ke depannya, mengingat PERMA 1/2020 sudah berlaku sejak 4 (empat) tahun lalu. MA juga perlu mempertimbangkan kepatuhan tersebut sebagai salah satu kualifikasi dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja para hakim.

Kepatuhan Penerapan PERMA 1/2020 (Sampling PN) 2022



KPK

Tren Rata-rata tuntutan Tipikor oleh KPK (bulan)

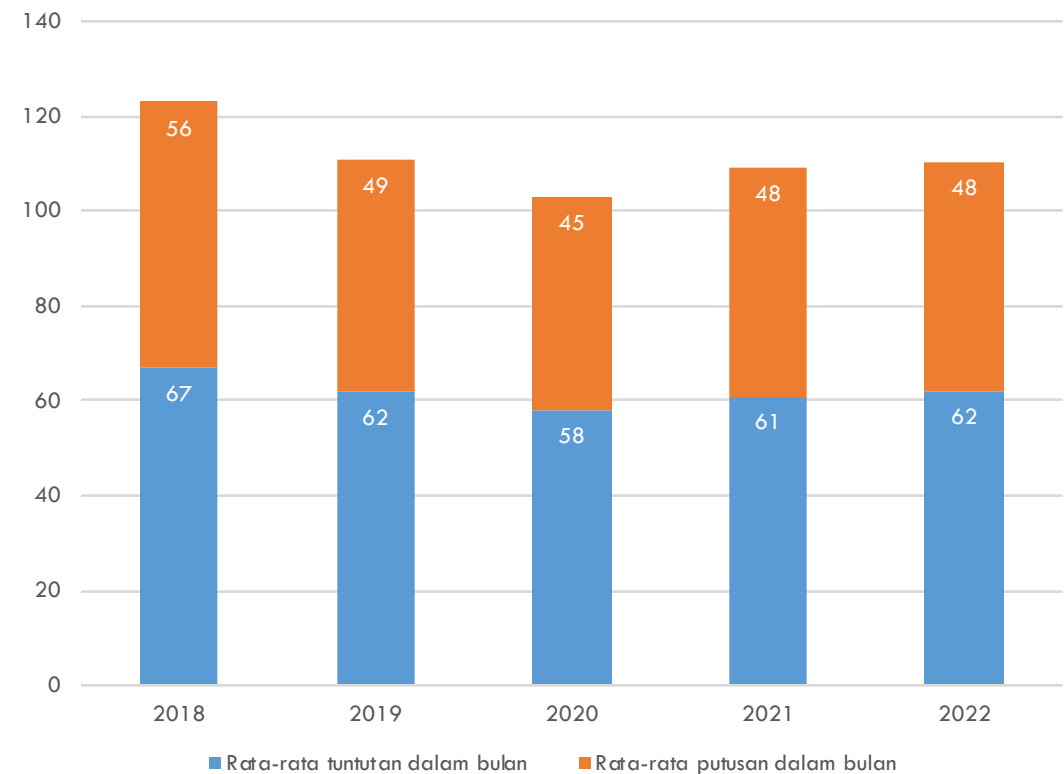


- KPK menuntut 141 terdakwa pada tahun 2022, atau hanya sekitar 8,42% dari keseluruhan terdakwa yang diputus pada 2022. Ada 91 terdakwa yang diputus di tingkat pengadilan negeri, 34 terdakwa diputus di tingkat pengadilan tinggi, dan 16 terdakwa diputus di tingkat MA.
- Adapun KPK menangani perkara korupsi dengan jumlah kerugian negara Rp1,003 triliun dengan jumlah pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp201,2 miliar, nilai suap-gratifikasi-pemerasan Rp641,3 miliar dan TPPU sebesar Rp2,8 miliar

KPK: Tren Vonis Tipikor 2022

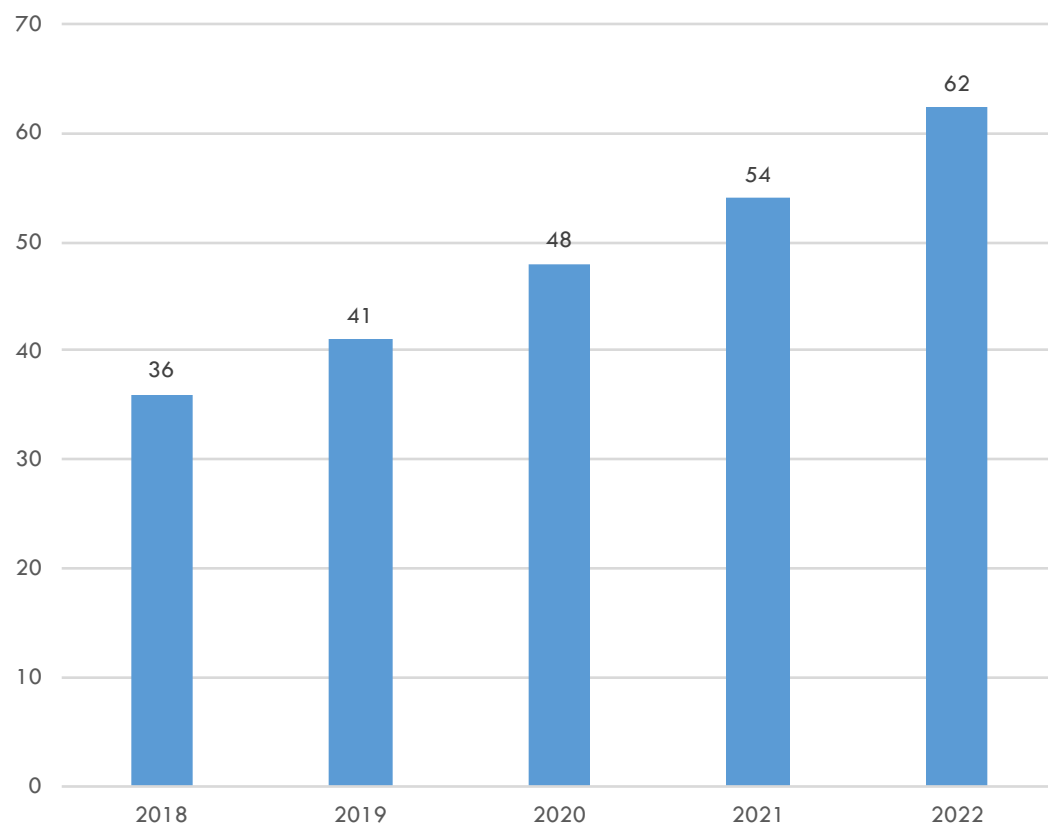
- Rata-rata putusan KPK di tahun 2022 mengalami stagnasi sejak tahun 2021 yaitu, 48 bulan atau 4 tahun.
- Pada 2022, mayoritas kategori putusan yang perkaranya dituntut oleh KPK adalah putusan dengan kategori ringan yaitu, 89 terdakwa (63.57%), sedangkan yang diputus dengan kategori sedang ada 49 terdakwa (35%). Tidak ada terdakwa yang diputus dengan kategori vonis berat, dan ada 2 (dua) orang terdakwa yang divonis bebas di tingkat PN dan MA (1.43%).

Tren Rata-rata Tuntutan x Putusan KPK (bulan)
2018-2022



Kejaksaan

Tren Rata-rata tuntutan Tipikor oleh Kejaksaan (bulan)

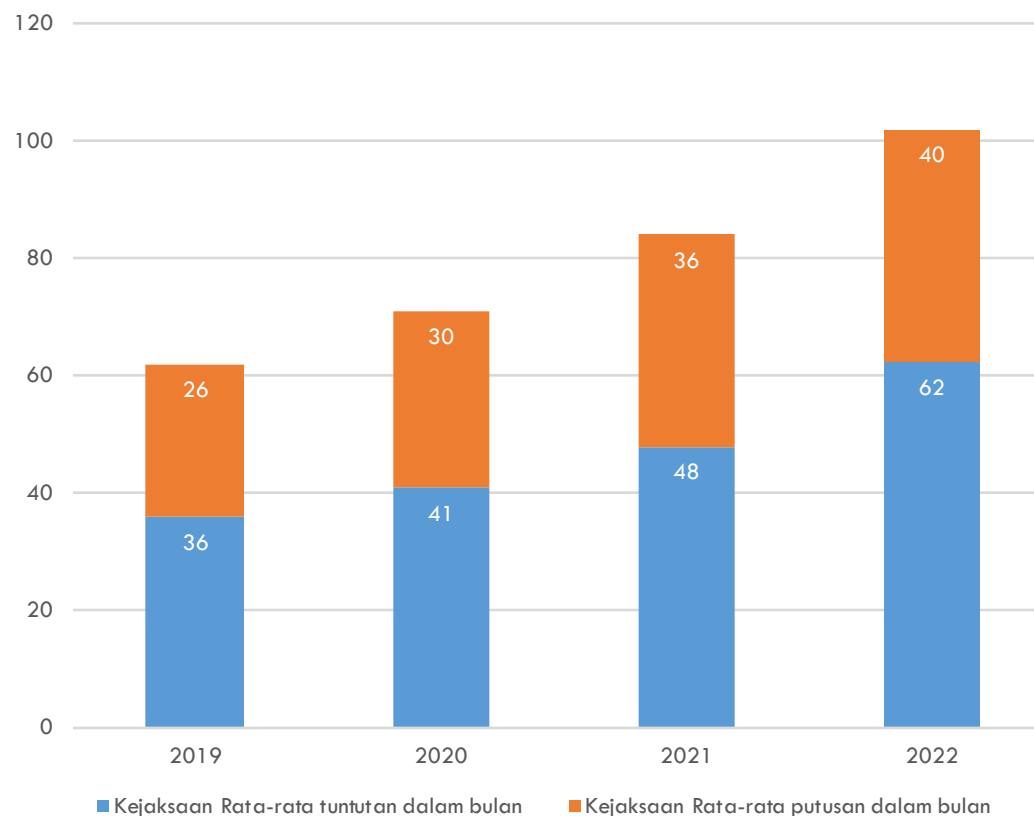


- Mayoritas tuntutan Kejaksaan di tahun 2022 masuk dalam kategori sedang. Dari total 2.108 terdakwa, 821 terdakwa (36.51%) yang penuntutannya masuk kategori ringan, 1.179 terdakwa (52.42%) masuk kategori sedang, dan 108 terdakwa (4.8%) masuk kategori berat.
- Rata-rata tuntutan kejaksaan di tingkat PN adalah, 4 tahun 8 bulan atau 57 bulan, sedangkan di tingkat PT rata-rata tuntutannya adalah, 69 bulan atau 5 tahun 8 bulan. Pada tingkat MA, rata-rata tuntutan Kejaksaan adalah, 68 bulan atau 5 tahun 7 bulan, sehingga rata-rata keseluruhan tuntutan Kejaksaan adalah, 62 bulan atau 5 tahun 2 bulan.

Kejaksaan: Tren Vonis Tipikor 2022

- Rata-rata putusan tipikor yang ditangani Kejaksaan di tahun 2022 adalah, 40 bulan atau 3 tahun 4 bulan.
- Dari 2.108 terdakwa yang dituntut oleh Kejaksaan, ada 1.426 terdakwa (67,65%) yang divonis dengan kategori ringan, dengan terdakwa yang divonis sedang sebanyak 492 orang (23,34%), dan kategori berat sebanyak, 55 terdakwa atau 2,61%.
- Serupa dengan tren rata-rata putusan perkara korupsi yang dituntut KPK, rata-rata putusan yang dituntut oleh Kejaksaan juga cenderung mengikuti tren penuntutannya. Namun, lonjakan rata-rata tuntutan Kejaksaan pada 2022, tidak dibarengi dengan lonjakan signifikan dari rata-rata putusannya.

Tren Rata-rata Tuntutan x Putusan Kejaksaan (bulan)





Rekomendasi

- Mayoritas latar belakang pekerjaan terdakwa yang penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan, masih pada tataran kepala desa, perangkat desa, dan pegawai pemda. Ke depannya, Kejaksaan perlu lebih fokus dalam menangani perkara korupsi strategis, seperti tipikor yang melibatkan kepala daerah, menteri, ataupun anggota legislatif;
- Jaksa Agung perlu mengaktifasi kembali mekanisme eksaminasi tuntutan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep – 033/JA/3/1993 tentang Eksaminasi Perkara, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja penuntut umum dan dakwaan yang dihasilkannya;
- Perlu ada imbauan dari Jaksa Agung maupun Ketua KPK untuk para penuntut umum, agar dapat memaksimalkan penggunaan instrumen UU TPPU untuk memaksimalkan upaya perampasan aset;
- Kejaksaan maupun KPK harus segera menyusun pedoman penuntutan untuk tindak pidana korupsi non-kerugian negara yang juga masih memunculkan disparitas penuntutan;
- Mahkamah Agung perlu meningkatkan kualitas kerja melalui penjatuhan putusan bagi terdakwa tipikor, dan menjadi contoh bagi pengadilan di bawahnya dalam hal mematuhi penerapan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 dalam memutus perkara korupsi yang berdimensi kerugian negara;
- Masih ada hakim yang tidak menjadikan SEMA 3/2018 dan PERMA 1/2020 sebagai rujukan utama dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum. Hal ini perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung ke depannya, dan menjadikan kepatuhan hakim dalam menerapkan kedua peraturan di atas, sebagai salah satu komponen penilaian kinerja hakim;
- Mahkamah Agung perlu mengaktifasi kembali mekanisme eksaminasi putusan, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerja hakim dan putusan yang dihasilkannya;
- MA perlu segera membahas dan menyusun pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi, untuk pasal-pasal korupsi non-kerugian negara;
- MA juga perlu segera menyusun pedoman penjatuhan pidana penjara pengganti uang pengganti, untuk meminimalisasi kesenjangan putusan antarterdakwa;
- Menuju tahun politik 2024, penuntut umum dan lembaga kekuasaan kehakiman perlu lebih serius menjatuhkan sanksi pencabutan hak politik bagi para koruptor yang memiliki latar belakang sebagai politisi.

TERIMA KASIH

Ayo dukung gerakan antikorupsi.

